

TELAAH SINGKAT PENGENDALIAN INFLASI  
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Oleh: M. Hatta



► *membuka cakrawala berpikir ideologis*

Publikasi:

JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS

<http://www.jurnal-ekonomi.org/2008/06/16/telaah-singkat-pengendalian-inflasi-dalam-perspektif-kebijakan-moneter-islam/>

email: [muttaqin \[at\] jurnal-ekonomi.org](mailto:muttaqin@jurnal-ekonomi.org)

## A. Pendahuluan

Sebelas tahun sudah Asia Tenggara khususnya Indonesia<sup>1</sup> melewati sebuah peristiwa ekonomi yang telah membuka mata dan pikiran semua pihak betapa rapuhnya bangunan ekonomi yang dibangun. Setelah sebelumnya mendapat julukan sebagai The East Asian Miracle dan macannya Asia (Asian tiger), tidak lama berselang terjadilah guncangan (shock) ekonomi yang berawal dari sisi moneter. Dari sisi nilai tukar (exchange rate), pada tanggal 18 Januari 1998 rupiah mencapai puncak kejatuhannya dengan menembus angka Rp. 16.000 per 1 dolar AS.<sup>2</sup> Dari sisi inflasi, angka inflasi mencapai 77,60 % dan PDB -13,20 %.<sup>3</sup>

Bagaimana dengan kondisi ekonomi saat ini? Kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2007 secara umum berada dalam tekanan krisis pada sektor properti (kredit macet subprime mortgage)<sup>4</sup> yang terjadi di Amerika Serikat serta melambungnya harga minyak dunia yang mencapai US \$100 per barrel<sup>5</sup> dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.<sup>6</sup>

Sebagaimana halnya di tahun 2007, kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun 2008 masih tetap dalam tekanan krisis subprime mortgage yang masih terus berlanjut di AS bahkan ada kecenderungan untuk semakin gawat,<sup>7</sup> berpotensi harga minyak dunia mengalami kenaikan yang tajam,<sup>8</sup> masih berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.<sup>9</sup> Serta dikeluarkannya keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM sekitar 28,5 % yang sudah dapat dipastikan berimplikasi kepada kenaikan harga-harga barang.<sup>10</sup> Walaupun kondisi ekonomi Indonesia masih menunjukkan stabilitas yang terjaga,<sup>11</sup> faktor-faktor eksternal di atas akan sangat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan pencapaian target

---

<sup>1</sup> Indonesia sudah mengalami krisis ekonomi sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 1940an (ketika penjajahan Jepang), tahun 1965 (disaat ambruknya pemerintahan Bung Karno), ketiga pada tahun 1997 yang lalu. Lihat Wawancara Prof. Sumitro Djojohadikusumo, dalam <http://www.tempo.co.id/har/ti/juni10-1.htm>. Lihat juga Sejarah BI; Moneter, <http://www.bi.go.id>

<sup>2</sup> Ismail Yusanto. Mencari Solusi Krisis Ekonomi. Dalam buku Dinar Emas Solusi Krisis Moneter, cet. I (Jakarta: PIRAC, SEM Institute, Infid, 2001), hal. 3

<sup>3</sup> Staf Ahli Meneg PPN Bidang Ekonomi Perusahaan. Pengkajian dan Monitoring Pelaksanaan Penyehatan Perbankan, hal. 4

<sup>4</sup> Subprime mortgage adalah sebuah fasilitas kredit rumah yang diperuntukkan bagi kalangan masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah. Oleh karenanya kredit ini mempunyai potensi gagal (default) bayar yang sangat tinggi. Lihat Kajian Stabilitas Keuangan No. 9, September 2007, hal. 16, <http://www.bi.go.id>

<sup>5</sup> Analisis faktor penyebab naiknya harga minyak dunia bisa dilihat di <http://www.hizbut-tahrir.or.id>, Soal Jawab Kenaikan Harga Minyak Dunia.

<sup>6</sup> Faktor lain yang membayangi kondisi makroekonomi Indonesia adalah tingginya arus capital inflow yang berjangka pendek (hot money). Lihat Ibid., Kajian Stabilitas Keuangan No. 9, September 2007, hal. 3

<sup>7</sup> A Tony Prasetyantono. Menuju Jurang Kebangkrutan. <http://www.jurnal-ekonomi.org>

<sup>8</sup> Kurtubi, Gejolak harga minyak dan APBN 2008. <http://www.UNISOSDEM.org>. Hal ini diperparah tren tingkat produksi (lifting) minyak cenderung terus menurun akibat lapangan-lapangan minyak yang ada sudah berusia tua sementara penemuan lapangan minyak baru (eksplorasi) semakin minim. Lihat Jurnal al Wa'ie No.92 Tahun VIII, 2008.

<sup>9</sup> SEACEN: Krisis Finansial AS Diyakini Tak Mampir ke Asia. <http://www.detik.com>

<sup>10</sup> Akibat Spekulasi Harga Minyak Capai Rekor Baru US \$ 135. <http://www.jurnal-ekonomi.org>

<sup>11</sup> Pernyataan Gubernur Bank Indonesia : Bi Rate Tetap 8,0%, No.10/ 8 /Pshm/Humas. <http://www.bi.go.id>

inflasi di tahun 2008 ini.<sup>12</sup> Hal ini tentu saja akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sektor riil.

Keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa serta otoritas moneter.<sup>13</sup> Lebih dari itu, ada kecenderungan Inflasi dipandang sebagai permasalahan yang senantiasa akan terjadi.<sup>14</sup>

Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi. Setiap tahunnya otoritas moneter senantiasa menargetkan bahwa angka atau tingkat inflasi harus diturunkan menjadi satu digit atau inflasi moderat.<sup>15</sup>

Dengan paradigma berpikir seperti itu, otoritas moneter dalam upayanya menyelesaikan permasalahan inflasi cenderung “berkutut” pada bagaimana menurunkan tingkat inflasi yang tinggi, bukan berpikir bagaimana agar inflasi tidak terjadi.<sup>16</sup>

Upaya otoritas moneter mengendalikan inflasi memang sangatlah beralasan. Terutama disebabkan dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari segi biaya, biaya yang harus ditanggung pemerintah dengan adanya inflasi sangatlah besar.<sup>17</sup> Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga riil, pendapatan masyarakat akan terganggu, mendorong investasi yang keliru, dan menurunkan moral.<sup>18</sup> Maka dari itu, mengatasi inflasi merupakan sasaran utama kebijakan moneter.<sup>19</sup>

Secara empirik, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari krisis tahun 1997 - 1998 yang mengakibatkan terganggunya sektor riil. Krisis ini diawali dari krisis di sektor moneter (depresiasi nilai tukar rupiah dengan dolar) yang kemudian merambat kepada semua sektor tanpa terkecuali.<sup>20</sup> Tingkat Inflasi ketika itu sebesar 77,60 % yang diikuti pertumbuhan ekonomi minus 13,20 %.<sup>21</sup> Adapun terganggunya sektor riil tampak pada kontraksi produksi pada hampir seluruh sektor perekonomian. Tahun 1998, seluruh sektor dalam perekonomian (kecuali sektor listrik, gas,

---

<sup>12</sup> Ibid., Target Bank Indonesia di tahun 2008 ini inflasi berada pada angka 4,5%.

<sup>13</sup> Bambang Kusumanto. Dapatkah Inflasi di Indonesia dijinakkan? Fiskal.depkeu.go.id. Kamis, 24 Mei 2007

<sup>14</sup> T. Gilarso. Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro, cet. IX (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. 398.

<sup>15</sup> Pada tahun 1998 triwulan pertama ketika inflasi sebesar 20% maka BI segera mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar 15%. Lihat Tony Prasetyantono, Efektivitas Rupiah Superketat, Majalah D&R, 04 April 1998.

<sup>16</sup> Riawan Amin, Mengendalikan atau Menghapus Inflasi, 18 Mei 2007, <http://www.sebi.ac.id>

<sup>17</sup> Besarnya biaya disinflasi (kebijakan untuk menurunkan tingkat inflasi) di Amerika pada periode 1980-1984 misalnya telah membebani negara sekitar \$ 215 milyar kerugian output (dalam harga 1990) per satuan persentase pengurangan inflasi. Lihat Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus. Macro Economics (Makro Ekonomi), cet. XI (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 336

<sup>18</sup> Ibid., hal. 320. Lihat juga Dictionary of Economics, second edition, alih bahasa oleh Tumpal Rumapea, Posman Haloho. Penerbit Erlangga, 1994. hal. 303.

<sup>19</sup> Undang Undang No. 23 Th. 1999 Tentang Bank Indonesia mengamanatkan pencapaian kestabilan nilai rupiah, khususnya dalam bentuk inflasi, sebagai sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia. Conference on Monetary Policy and Inflation Targeting in Emerging Economies. <http://www.bi.go.id>

<sup>20</sup> Ismail Yusanto. Mencari Solusi Krisis Ekonomi, hal. 2

<sup>21</sup> Staf Ahli Menneg PPN Bidang Ekonomi Perusahaan. Pengkajian dan Monitoring Pelaksanaan Penyehatan Perbankan, hal. 4

dan air bersih) mengalami kontraksi. Sektor konstruksi mengalami kontraksi terbesar yaitu 36,4 %. Disusul kemudian sektor keuangan sebesar 26,6 %.<sup>22</sup>

Inflasi sesungguhnya mencerminkan kestabilan nilai sebuah mata uang.<sup>23</sup> Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi.<sup>24</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, kestabilan nilai mata uang sangat penting untuk dijaga yang merupakan cerminan dari inflasi. Maka timbul pertanyaan, bagaimana caranya menjaga kestabilan nilai mata uang kertas sekarang?

Sistem moneter dunia kini dikuasai fiat money yang sangat rentan dengan fluktuasi (Volatile<sup>25</sup>), kecuali beberapa negara yang menggunakan uang dwi-logam (dinar dan dirham).<sup>26</sup> Implikasi dari dominannya penggunaan fiat money, perjalanan perekonomian dunia senantiasa mengalami "pasang-surut". Robert A Mundell, peraih nobel ekonomi, mengatakan ketika masyarakat dunia menggunakan fiat money, maka konsekuensi logisnya, mereka telah memasuki tahapan ekonomi baru: regime of permanent inflation atau inflasi abadi.<sup>27</sup> Hal yang sama juga dikatakan oleh William Cobbet dalam tulisannya yang berjudul *Peper Againts Gold* (1828). Ia mengatakan bahwa utang nasional dan inflasi adalah anak dari sistem uang kertas.<sup>28</sup>

Dalam rangka mengendalikan inflasi dan menjaga stabilnya nilai mata uang, Pemerintah dan otoritas moneter yang ada mengambil beberapa kebijakan baik dari segi moneter, fiskal, maupun sektor riil.<sup>29</sup> Dari segi moneter maka bank sentral akan menaikkan suku bunga dan pengetatan likuiditas perbankan, mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter, menentukan sasaran akhir kebijakan moneter, mengidentifikasi variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan inflasi, memformulasikan respon kebijakan moneter.<sup>30</sup>

Dari segi fiskal, pemerintah menerapkan kenaikan prosentase pungutan pajak, mengadakan pinjaman sukarela atau pinjaman paksa, memotong uang, membekukan sebagian atau seluruhnya simpanan-simpanan

---

<sup>22</sup> Deniey Adi Purwanto, Sudahkah Perekonomian Indonesia Keluar dari Krisis?

<sup>23</sup> Peranan Bank Indonesia Dalam Pengendalian Inflasi, 24 Mei 2007, <http://www.bi.go.id>

<sup>24</sup> Mulya E. Siregar. Manajemen Moneter Alternatif, dalam Buku Dinar Emas Solusi Krisis Moneter. Cet. I (Jakarta; PIRAC, SEM Institute, Infid, 2001), hal. 88

<sup>25</sup> Volatile sama dengan tidak stabil, rentan fluktuasi, atau nilainya gampang mengalami naik turun secara relatif dibandingkan dengan mata uang lainnya. Lihat M. Lutfi Hamidi. *Gold Dinar (Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan)*, cet. I (Jakarta: Senayan Publishing, 2007), hal. 32

<sup>26</sup> Negara tersebut adalah Kuwait, Yordania, Tunisia, Bahrain, Iran dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Lihat, Benny, "Pengaruh Penggunaan Mata Uang Berbasis Emas (Dinar Kuwait) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kuwait Tahun 1994-2003", Skripsi: STIKER, Yogyakarta, hal. 11

<sup>27</sup> A. Riawan. Mengendalikan atau Menghilangkan Inflasi, <http://www.sebi.ac.id>

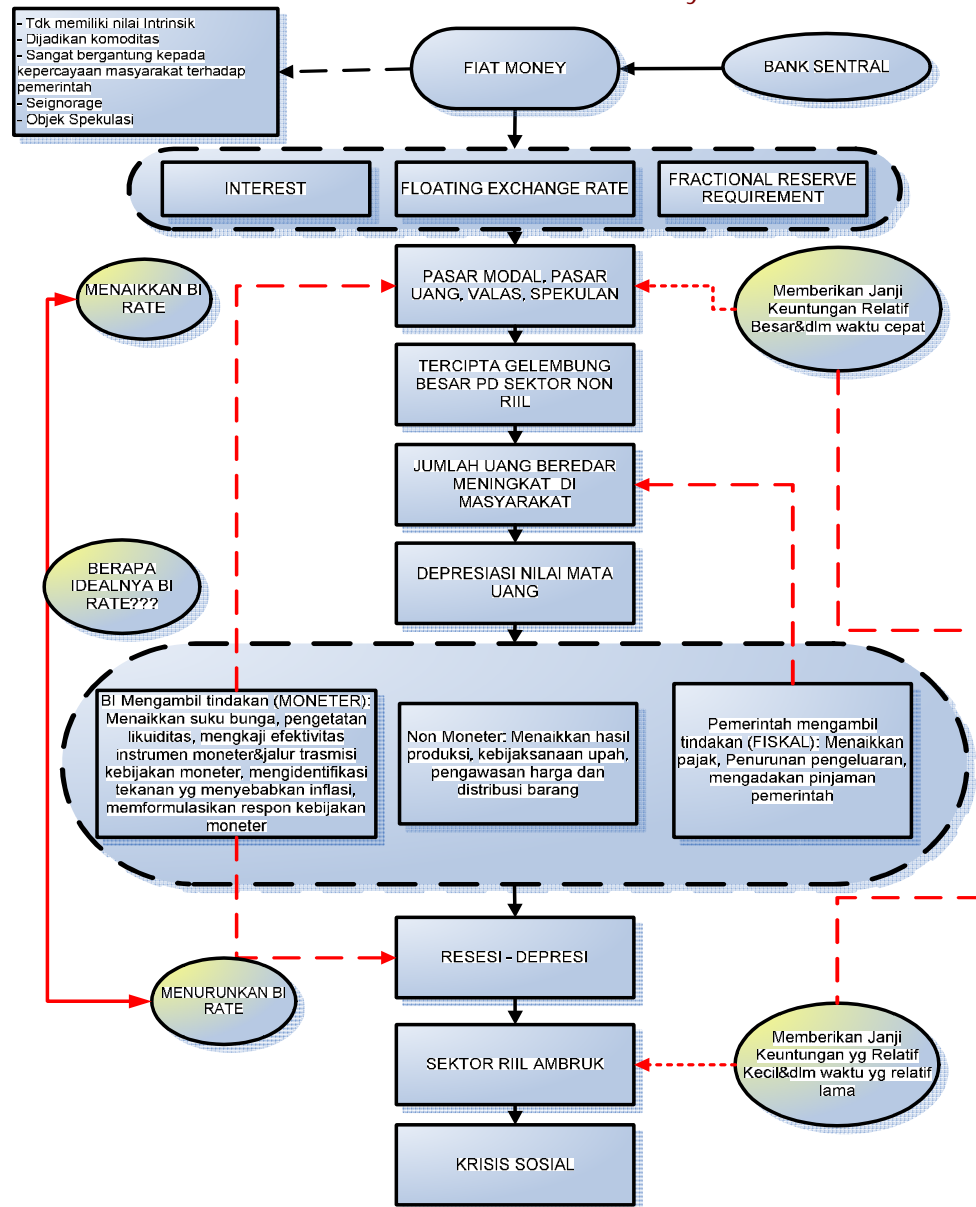
<sup>28</sup> Tarek El Diwany. *The Problem with Interest (Sistem bunga dan Permasalahannya)*, cet. I (Jakarta: Akbar, 2003), hal. 53

<sup>29</sup> Peranan Bank Indonesia Dalam Pengendalian Inflasi, 24 Mei 2007, <http://www.bi.go.id>

<sup>30</sup> Ibid.,

(deposito) pihak-pihak partikular (bukan punya pemerintah) yang ada dalam bank-bank, serta penurunan pengeluaran pemerintah.<sup>31</sup>

Gambar 1. Dilema Kebijakan Pengendalian Inflasi dan Akibat Buruk Fiat Money



Sumber: Diolah sendiri dari beberapa sumber

Tampak pada gambar di atas, tindakan BI, Pemerintah, dan Usaha Swasta dalam mengendalikan inflasi hanyalah sebatas menyentuh permasalahan teknis atau gejala (symptom) semata.

<sup>31</sup> M. Manullang. Ekonomi Moneter, cet. XIII (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hal. 93-

Sebaliknya, perpaduan kebijakan<sup>32</sup> yang digunakan menimbulkan krisis bertambah parah. Inilah sebuah dilema yang sampai saat ini belum terpecahkan sebagaimana secara jelas dikatakan oleh Samuelson dan Nordhaus. Bahkan mereka mengatakan kebijakan atau solusi yang ditawarkan oleh para ahli dalam memecahkan permasalahan inflasi dan pengangguran secara bersamaan justru menyebabkan efek sampingan yang lebih buruk dari penyakitnya itu sendiri.<sup>33</sup> Ini terjadi dikarenakan "obat" yang diberikan hanya sebatas menghilangkan penyakit bagian permukaan saja, sementara penyakit bagian dalamnya masih belum disembuhkan.<sup>34</sup>

Penyakit bagian dalam yang belum tersentuh oleh perpaduan kebijakan di atas adalah terkait dengan hakikat mata uang itu sendiri dan sistem yang melingkupinya<sup>35</sup> serta penyalahgunaan dari fungsi dasar uang sebagai alat tukar yang bertambah menjadi tidak hanya sebatas sebagai alat tukar, melainkan juga menjadi sebuah barang (komoditas) yang turut diperdagangkan dengan imbalan bunga (interest).<sup>36</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, kehadiran kebijakan moneter alternatif (mata uang yang kuat dan stabil, serta kebijakan moneter yang tidak memunculkan dilema di sektor riil) yang mampu mengendalikan inflasi sudah sangat mendesak dibutuhkan dan segera diaplikasikan.

Dalam hal ini, Abdul Qadim Zallum (Pemimpin Ke 2 Hizbut Tahrir) dalam bukunya Sistem Keuangan di Negara Khilafah mengatakan bahwa, sistem moneter yang berbasis kepada emas dan perak merupakan satu-satunya sistem moneter yang mampu menyelesaikan problematika mata uang, menghilangkan inflasi besar-besaran yang menimpa seluruh dunia, dan mampu mewujudkan stabilitas mata uang dan stabilitas nilai tukar, serta bisa mendorong kemajuan perdagangan internasional.<sup>37</sup>

Untuk itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti kebijakan moneter alternatif yang mampu mengendalikan inflasi menurut Hizbut Tahrir. Meskipun secara khusus, sebenarnya Hizbut Tahrir tidak pernah membuat konsep moneter Islam baik dalam buku, booklet, leaflet, dan publikasi-publikasi resmi Hizbut Tahrir lainnya, namun kebijakan moneter Hizbut Tahrir dapat dihimpun dan dianalisa dari pandangan Hizbut Tahrir tentang dinar &

---

<sup>32</sup> Di Indonesia, sinergi kebijakan dalam rangka antisipasi inflasi ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menyatakan pengendalian inflasi akan dilakukan dalam suatu forum yang dikoordinasi oleh Menko Perekonomian, yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menteri Perdagangan, dan menteri-menteri terkait. Pembahasan yang lebih lanjut tentang sinergi kebijakan antara pemerintah dengan otoritas moneter dapat dibaca pada Iskandar Simorangkir. Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia: Suatu Kajian dengan Pendekatan Game Theory. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, vol. 9, no. 3, Januari 2007.

<sup>33</sup> Lihat Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Economic Macro* (Makro Ekonomi), hal. 322. Dilema kebijakan moneter digambarkan oleh Kwik Kian Gie dengan pernyataan "Jangan sampai nilai tukar rupiah merosot walaupun sektor riilnya ambruk", Lihat Kwik Kian Gie, *Membengkaknya Sertifikat BI*. *Bisnis Indonesia*, 4 maret 2007, dalam <http://www.UNISOSDEM.org>. Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat memberikan keterangan perihal beban besar yang ditanggung BI dalam setahun untuk membiayai bunga dari SBI (sebesar 20 triliun) sejatinya dapat meningkatkan sektor riil yang cukup signifikan, lihat Gung Panggodo S, *Menanti Trobosan di Sektor Keuangan*. *Bisnis Indonesia*, 5 Maret 2007, dalam <http://www.UNISOSDEM.org>. *Ibid.*, Ryan Kiryanto, *Dana di SBI: Sebuah Dilema*

<sup>34</sup> Pengendalian inflasi dalam perspektif al Qur'an, <http://www.dwicondro.blogspot.com>

<sup>35</sup> fractional reserve requirement, floating exchange rate, interest

<sup>36</sup> Lihat gambar 1. Ismail Yusanto. *Mencari Solusi.*, hal. 3

<sup>37</sup> Abdul Qadim Zallum. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, cet. I (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 239

dirham sebagai mata uang, hukum jual beli mata uang asing, hukum pertukaran mata uang, hukum riba, hukum pasar modal, hukum perbankan, hukum pertukaran internasional.

## B. Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam

### 1. Definisi Kebijakan Moneter dan Inflasi

Untuk memudahkan analisa permasalahan pengendalian inflasi dalam perspektif kebijakan moneter Islam, maka penulis terlebih dahulu akan membahas secara singkat berkaitan dengan dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yakni kebijakan moneter dan inflasi.

Aulia Pohan mengatakan kebijakan moneter (*monetary policy*) adalah suatu pengaturan di bidang moneter yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>38</sup> Hampir senada dengan definisi yang diutarakan Pohan, dalam kamus istilah keuangan dan perbankan kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter, dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>39</sup>

Wikipedia memberikan definisi kebijakan moneter dengan sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter dari sebuah negara untuk mengontrol, penawaran uang, ketersediaan uang, tingkat bunga, dalam rangka mencapai seperangkat tujuan orientasi kepada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dimana biasanya kebijakan moneter dikenal sebagai pilihan antara kebijakan ekspansi atau kebijakan kontraksi.<sup>40</sup> Definisi ini hampir senada dengan definisi yang diberikan oleh *Dictionary of Economics*, dimana dikatakan kebijakan moneter adalah suatu instrumen kebijakan ekonomi makro yang mengatur penawaran uang, kredit dan tingkat bunga dalam rangka mengendalikan tingkat pembelanjaan atau pengeluaran dalam perekonomian.<sup>41</sup>

Definisi kebijakan moneter yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Pohan. Definisi ini lebih bersifat netral (tidak memihak kepada salah satu aliran ekonomi yang ada, sebagaimana definisi yang ada pada wikipedia dan kamus *Istilah Keuangan dan Perbankan* yang lebih dominan kepada aliran moneteris).<sup>42</sup>

Adapun definisi inflasi dalam *Dictionary of Economics* didefinisikan dengan suatu peningkatan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu.<sup>43</sup> Samuelson dan Nordhaus dalam buku mereka *Macro Economics* mendefinisikan inflasi

---

<sup>38</sup> Aulia Pohan. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 11

<sup>39</sup> Aliminsyah dan Padji. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, cet. II (Bandung: Yrama Widya, 2006), hal. 186

<sup>40</sup> *Monetary Policy*, dalam <http://www.wikipedia.com>

<sup>41</sup> *Dictionary of Economics*, hal. 416-417

<sup>42</sup> Indikasi dari ketidaknetralan tersebut adalah disebutkannya kontrol penawaran uang, tingkat bunga, kebijakan ekspansi dan kontraksi moneter.

<sup>43</sup> *Dictionary of Economics*, hal. 303

dengan cukup pendek yaitu kenaikan tingkat harga umum.<sup>44</sup> Adapun Bank Indonesia mendefinisikan inflasi dengan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus.<sup>45</sup>

Definisi di atas mendapat kritikan cukup tajam dari mazhab ekonomi Austria. Ekonom dari mazhab Austria mengatakan bahwa definisi inflasi di atas tidak menggambarkan fakta inflasi sesungguhnya, terlebih lagi adalah faktor pemicu inflasi itu sendiri. Definisi di atas hanya sebatas menjelaskan salah satu akibat inflasi.<sup>46</sup>

Aliminsyah dan Padji memberikan definisi inflasi sebagai berikut "suatu keadaan yang menunjukkan jumlah peredaran uang yang lebih banyak dari pada jumlah barang yang beredar, sehingga menimbulkan penurunan daya beli uang dan selanjutnya terjadi kenaikan harga yang menyolok"<sup>47</sup>. Definisi ini hampir senada dengan yang disampaikan oleh Murray N. Rothbard.<sup>48</sup>

Terjadinya perbedaan dalam mendefinisikan inflasi ini dikarenakan sebagian pakar ekonomi menjelaskan makna inflasi berdasarkan sebab yang menimbulkan inflasi dan sebagian yang lain berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh inflasi.<sup>49</sup>

Secara umum, definisi inflasi yang jamak dipakai adalah definisi yang penulis tulis pada bagian pertama.<sup>50</sup> Sebagaimana halnya definisi kebijakan moneter yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam definisi inflasi penulis menggunakan definisi inflasi yang disampaikan oleh Bank Indonesia.

Mengapa penulis menggunakan definisi inflasi yang pertama? Ada dua alasan yang penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, harus kita pahami bahwa sebuah definisi adakalanya berasal dari sebuah konsep tentang nilai yang dalam perumusannya diharuskan merujuk kepada dalil-dalil syar'i dan adakalanya terkait dengan konsep yang murni berasal dari sebuah fakta.<sup>51</sup>

Definisi inflasi sepenuhnya didasarkan pada penelaahan yang cermat (dan tepat) terhadap fakta fenomena perkembangan harga barang dan jasa. Dengan kata lain, definisi inflasi adalah berbicara fakta apa adanya (das sein), bukan berbicara apa yang seharusnya (das sollen).<sup>52</sup> Dalam hal ini, definisi inflasi kelompok yang ke dua tidaklah menggambarkan fakta apa adanya.<sup>53</sup>

Ini sama halnya ketika kita mendefinisikan tentang akal. Akal atau berpikir adalah proses pemindahan fakta melalui indera ke dalam otak disertai dengan informasi sebelumnya yang digunakan untuk menafsirkan fakta

---

<sup>44</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus. *Macro Economics*, hal. 307

<sup>45</sup> <http://www.bi.go.id>

<sup>46</sup> Murray N. Rothbard. *What has Government Done to Our Money? (Apa yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?)*, cet I (Jakarta; Granit, 2007), hal. Xiii-xiv

<sup>47</sup> Aliminsyah dan Padji. *Kamus Istilah.*, hal. 370

<sup>48</sup> Murray N. Rothbard. *What has...* Lihat juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IX (Jakarta; Balai Pustaka, 1997), hal. 378. Lihat juga *Inflasi*, <http://www.id.wikipedia.org>

<sup>49</sup> Ahmad Hasan. *Al Auraq Al Naqdiyah Fi Al- Iqtishad Al Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha) (Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 273-274

<sup>50</sup> Kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus

<sup>51</sup> Muhammad Shiddiq Al Jawi, *Seputar Konsep Syakhsiyah*. <http://www.khilafah1924.org>

<sup>52</sup> *Ibid.*,

<sup>53</sup> Memasukkan unsur jumlah uang beredar

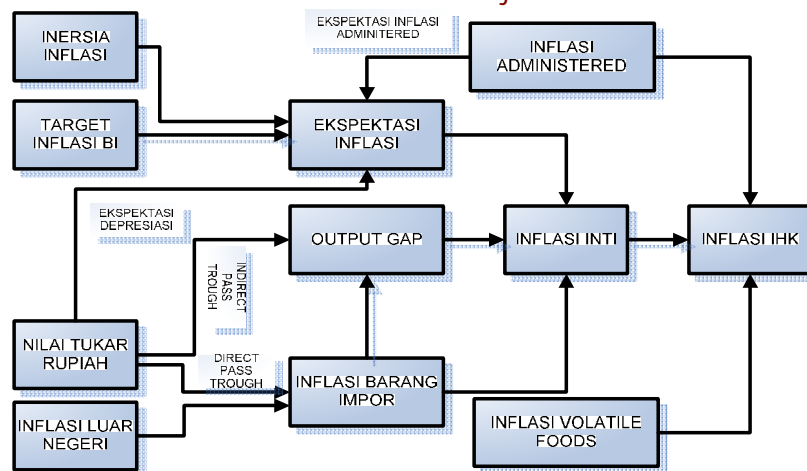
tersebut. Definisi ini diperoleh dari fakta kegiatan berpikir manusia.<sup>54</sup> Metode telaah seperti inilah yang seharusnya juga diterapkan dalam mendefinisikan fakta tentang inflasi.

Kedua, sebagaimana halnya definisi kebijakan moneter, definisi inflasi kelompok yang ke dua memasukkan unsur besaran jumlah uang beredar sehingga definisi tersebut tidak bersifat netral (mengikuti aliran monetaris).

Dengan kata lain, ia hanya memuat salah satu dari penyebab terjadinya inflasi. Padahal secara faktual penyebab inflasi sangatlah beragam sebagaimana yang penulis tuliskan di bawah ini.

Secara umum, berdasarkan penyebabnya inflasi terbagi ke dalam 3 macam, yakni: Pertama, tarikan permintaan (demand-pull inflation). Inflasi ini timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian. Kedua, dorongan biaya (cost-push inflation). Inflasi ini timbul karena adanya depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Ketiga, ekspektasi inflasi. Inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional.<sup>55</sup>

Gambar 2  
Keterkaitan Antar Jenis-jenis Inflasi



Sumber: <http://www.bi.go.id>

<sup>54</sup> Muhammad Shiddiq al Jawi, Seputar.,

<sup>55</sup> <http://www.bi.go.id>

Dalam rangka menjaga inflasi agar tetap dalam tingkat moderat baik pemerintah (kebijakan fiskal) maupun otoritas moneter (kebijakan moneter) mengambil sejumlah langkah sebagaimana yang telah kami tuliskan pada bagian latar belakang.<sup>56</sup>

Bagaimana inflasi dalam perekonomian Islam? Sesungguhnya, apabila inflasi didefinisikan dengan kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum, maka akan kita dapati bahwa dalam setiap perekonomian (apakah itu menggunakan sistem ekonomi Kapitalis ataupun Islam) akan senantiasa ditemui permasalahan inflasi.

Hanya saja, terdapat perbedaan yang cukup signifikan (baik secara kuantitatif maupun kualitatif) antara permasalahan inflasi yang ada di dalam perekonomian Islam dengan yang ada di dalam perekonomian Kapitalis.

Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan itu adalah dikarenakan mata uang yang digunakan dalam perekonomian Islam adalah bimetalik (dinar dan dirham). Dimana dalam diri dinar dan dirham tersebut mempunyai sejumlah keunggulan dibandingkan dengan mata uang kertas yang digunakan pada saat ini. Salah satu keunggulan itu adalah adanya nilai intrinsik (nilai ini tidak terdapat pada fiat money) yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, inflasi yang disebabkan faktor lemahnya mata uang (depresiasi nilai) sebagaimana yang terjadi dalam perekonomian Kapitalis tidak akan terjadi dalam perekonomian Islam.<sup>57</sup>

## 2. Kebijakan Moneter

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dalam tulisan ini penulis akan mencoba memberikan deskripsi kebijakan moneter Islam (Perspektif Hizbut Tahrir) dalam mengendalikan inflasi.

Setidaknya ada tujuh kebijakan moneter Islam yang menurut penulis dapat mengendalikan inflasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu: Dinar dan dirham sebagai mata uang, hukum jual beli mata uang asing, hukum pertukaran mata uang, hukum bunga, hukum pasar modal, hukum perbankan, hukum pertukaran internasional, dan otoritas kebijakan moneter.

Di bawah ini penulis akan menjelaskan (secara singkat) empat dari tujuh kebijakan moneter di atas dalam kaitannya mengendalikan inflasi.

### 2.1 Dinar dan Dirham

Di atas penulis sudah menjelaskan bagaimana eksistensi dari fiat money yang secara pasti menyebabkan terjadinya inflasi. Lebih dari itu, ia merupakan faktor utama terjadinya inflasi dalam sistem Kapitalisme.

Berbeda halnya dalam sistem ekonomi Islam, inflasi yang disebabkan kelemahan dari mata uang relatif cukup kecil kemungkinan terjadinya (kalau tidak bisa dikatakan tidak akan terjadi).

---

<sup>56</sup> Pada halaman 5 dan 6

<sup>57</sup> Efek dari depresiasi nilai tukar mata uang akan mengakibatkan efek berantai, yaitu menurunnya nilai rupiah terhadap sejumlah barang yang sifatnya dibutuhkan dunia internasional (komoditi internasional; minyak misalnya), dan meningkatnya harga bahan baku bagi industri dalam negeri yang di dapatkan di luar negeri melalui mitra dagang sehingga mengakibatkan naiknya biaya produksi.

Mengapa demikian? Untuk mengetahui mengapa penggunaan dinar dan dirham dapat mengendalikan inflasi terlebih dahulu harus diketahui kelemahan dari fiat money. Setelah itu dikomparasikan dengan karakteristik mata uang dinar dan dirham.

Telah diketahui bahwa, Fiat money memiliki kelemahan yang teramat fatal.<sup>58</sup> Sebaliknya, dinar dan dirham tidaklah memiliki kelemahan sebagaimana yang ditemukan dalam fiat money. Faktor fundamental dari kekuatan dinar dan dirham adalah setaranya antara nilai nominal dengan nilai intrinsik yang terdapat pada mata uang tersebut.

Eksistensi nilai intrinsik ini akan secara otomatis menjaga nilai tukarnya terhadap mata uang lain. Sehingga inflasi yang disebabkan lemahnya nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang asing yang berdampak kepada naiknya komoditas impor, output gap,<sup>59</sup> dan ekspektasi inflasi<sup>60</sup> dapat dikatakan tidak akan terjadi.<sup>61</sup>

## 2.2 Hukum Bunga

Pergerakan ekonomi dalam sistem ekonomi konvensional sangat bergantung pada sistem bunga. Begitu pentingnya sistem bunga bagi ekonomi Kapitalisme, maka dalam kebijakan moneter konvensional struktur suku bunga menjadi salah satu instrumen moneter untuk mencapai sasaran akhir (inflasi).

Hampir semua sektor ekonomi Kapitalisme terkait dengan sistem bunga, mulai dari sektor riil terlebih lagi adalah sektor non riil. Sistem bunga mengakibatkan sektor non riil berkembang lebih cepat dibandingkan dengan sektor riil. Hal ini dikarenakan sektor non riil dalam memberikan keuntungan relatif lebih cepat dan besar jumlahnya apabila dibandingkan dengan sektor riil.

Akibatnya sektor riil mengalami kekurangan "darah" untuk menggerakkan roda ekonomi. Ketika roda ekonomi sudah berjalan lambat dan bahkan terhenti bisa dipastikan inflasi adalah sebuah keniscayaan yang akan terjadi.

Sebaliknya, Islam secara tegas berpendapat bahwa, bunga hukumnya adalah haram.<sup>62</sup> Kalau bunga dalam Islam diharamkan, lalu bagaimana caranya menggerakkan roda ekonomi?

Islam menggariskan bahwa, harta yang dimiliki oleh seseorang individu apabila ingin dikembangkan haruslah melewati cara yang memang

---

<sup>58</sup> Lihat gambar 1

<sup>59</sup> Output gap (deflationary gap) adalah kesenjangan output atau deflasi. Maksudnya adalah penurunan pengeluaran total permintaan agregat (aggregat demand) pada tingkat kesempatan kerja penuh (full employment) pendapatan nasional potensial (potensial GNP). Karena pengurangan beberapa pengeluaran, maka beberapa sumber-sumber ekonomi yang tidak produktif akan menyebabkan produksi nasional bruto actual (actual GNP) di bawah produksi nasional bruto potensial. Dictionary of Economics, hal. 135 dan 469.

<sup>60</sup> Inflasi yang disebabkan perilaku ekonomi masyarakat dan pelaku ekonomi (antisipasi) dari kejadian yang akan datang perihal perkembangan ekonomi, yaitu: pembentukan harga di tingkat produsen, dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional (UMR). Lihat Pengenalan inflasi di Indonesia dalam <http://www.bi.go.id>

<sup>61</sup> Lihat gambar 2, keterkaitan antara nilai tukar (rupiah) dengan inflasi komoditas impor

<sup>62</sup> Lihat pembahasan lengkap tentang bunga dalam M. Ahmad ad Da'ur. Bantahan Atas Kebohongan-kebohongan Hukum Seputar Riba dan Bunga Bank, cet. I (Bogor: Al Azhar Press, 2004).

dihalalkan oleh Allah Swt. Dalam hal ini Islam memberikan tiga pilihan apakah dengan cara usaha mandiri, kerjasama pihak kedua (syarikah), dan kerjasama pihak ketiga (melalui lembaga mediasi Bank Syariah).<sup>63</sup>

Dengan kata lain, Islam tidak mengizinkan pengembangan harta melalui perdagangan uang (uang beranak uang) dengan sistem bunga. Kebijakan Islam melarang perdagangan uang ini tentunya akan mencegah uang beredar pada tempat tertentu saja (sektor non riil),<sup>64</sup> sehingga kebutuhan "darah" (dana) bagi sektor riil dapat terpenuhi. Ketika dana segar bagi sektor riil telah tercukupi maka bisa dipastikan gerak dari roda ekonomi akan berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya inflasi.<sup>65</sup>

### 2.3 Hukum Perbankan

Dalam sistem ekonomi Kapitalisme, lembaga keuangan (perbankan) menempati posisi yang sangat menentukan. Melalui lembaga inilah sistem bunga dapat berjalan dengan baik dan bergerak sangat cepat.

Apabila dalam sistem ekonomi Kapitalisme perbankan merupakan suatu keniscayaan. Maka dalam sistem ekonomi Islam (SEI) adalah sebaliknya. Islam memandang pendirian suatu bank adalah mubah (boleh),<sup>66</sup> hanya saja kegiatan dari perbankan tersebut tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan (dhawabit) syari'ah.

Dengan demikian, apabila eksistensi perbankan dalam sistem ekonomi Kapitalisme cenderung semakin memperdalam jurang antara sektor riil dengan sektor non riil yang berujung kepada inflasi. Sebaliknya dalam SEI lembaga keuangan yang ada akan membantu atau mendukung pergerakan sektor riil.<sup>67</sup>

### 2.4 Otoritas Kebijakan Moneter Islam

Dalam SEI, otoritas kebijakan moneter dan fiskal tidaklah terpisah dengan struktur pemerintahan (lembaga eksekutif) yang ada sebagaimana yang ada pada SEK (sistem ekonomi Kapitalis). Kebijakan moneter dan Fiskal dalam SEI sama-sama berada di bawah departemen Baitul Maal.<sup>68</sup> Sehingga tidak diperlukan lagi koordinasi atau pembahasan apakah otoritas moneter dengan lembaga eksekutif perlu dipisahkan atau tidak untuk mengambil kebijakan moneter.<sup>69</sup>

---

<sup>63</sup> Ismail Yusanto. Analisis Keuangan Bank Muamalat Indonesia Pada Periode Krisis Ekonomi Tahun 1998 – 1999. Program Pascasarjan Sekolah Tinggi Ekonomi IPWI Jakarta, 2000.

<sup>64</sup> Lebih dari itu, eksistensi sektor non riil tidaklah diakui dalam Islam.

<sup>65</sup> Haramnya bunga juga didukung oleh kebijakan yang lain, yakni diterapkannya hukum zakat. Faktor ini juga sangat signifikan dalam mencegah menumpuknya uang atau harta kekayaan pada orang tertentu saja.

<sup>66</sup> Muhammad Husain Abdullah. Dirasat Fi al Fikri al Islami (Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam), cet. I (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 217

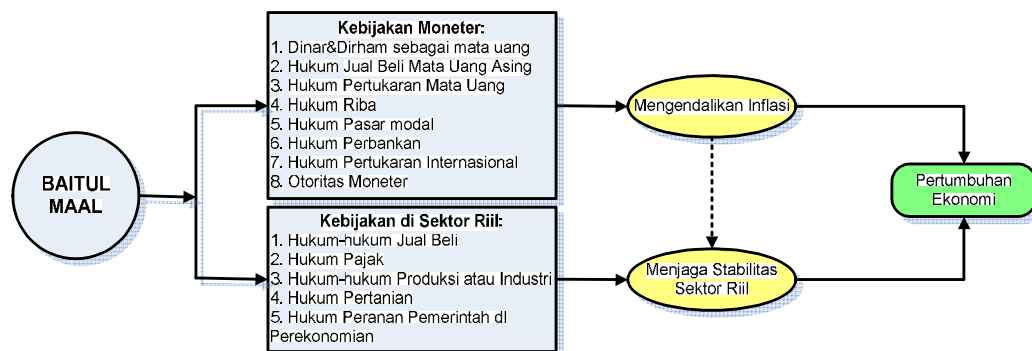
<sup>67</sup> Misalnya bank menjadi perantara antara pemilik modal dan pekerja untuk membentuk syirkah mudharabah dimana bank nantinya akan memperoleh komisi. Ibid., hal. 218. lebih dari itu, dalam SEI dikotomi sektor moneter (non riil) dan riil tidak dikenal. Kalaupun ada sektor moneter maka ia adalah suatu mekanisme pembiayaan transaksi atau produksi di pasar riil. Lihat Agustianto. Ke Arah Moneter Syari'ah (bagian II).

<sup>68</sup> Lihat <http://www.khilafah.com> dan Jaribah bin Ahmad Al Haritsi. Al Fiqh Al Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khathab (Fikih Ekonomi Umar bin Al Khathab), Cet. I (Jakarta: KHALIFA, 2006), hal. 339-348.

<sup>69</sup> Dalam SEK, diskursus kewenangan moneter apakah berada dibawah koordinasi eksekutif atau mutlak menjadi kewenangan bank sentral telah menjadi suatu hal yang teramat

Gambar 3

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter dan Sektor Riil Perspektif Islam dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi



C. Kesimpulan dan Penutup

Pada bagian kesimpulan ini penulis tidak hendak mengulang kembali pembahasan singkat yang telah dipaparkan di atas. Melainkan ingin menyampaikan bahwa Islam selain memiliki fikrah (konsep) juga memiliki thariqoh (metode) bagaimana menerapkan konsep yang telah ada tersebut.

Lebih dari itu, konsep Islam antara satu dengan yang lainnya saling terkait erat. Oleh karena itu, segala konsep yang diajarkan dalam Islam tidaklah dapat diterapkan secara parsial. Konsep Islam perlu dan harus diterapkan secara kaffah (totalitas).

Mana mungkin syariah Islam diterapkan dimana kepemimpinan politiknya berada dalam kungkungan demokrasi Kapitalisme, padahal syariah Islam mengutuk demokrasi??? Dalam konteks ini, mana mungkin kebijakan moneter berbasis syariah dijalankan oleh orang-orang yang menghamba kepada hukum thagut dan antek-antek barat???

Oleh karena itu, kebijakan moneter berbasis syariah yang telah penulis paparkan di atas hanya bisa diterapkan dan dijalankan oleh kepemimpinan yang juga sesuai dengan syariah, yakni Daulah Khilafah Rasyidah.

Wallhua'lam bi ash-shawab

---

pelik dan menguras energi banyak pihak. Lebih lengkapnya lihat Ibid., Iskandar Simorangkir Koordinasi Kebijakan Moneter